HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Disusun Oleh :

NAMA : ALMA BONITA HOKIANETTA

NPM : 161010141

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Alma Bonita Hokianetta

161010141

FS 671471

No. Reg : 963/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1737021837/29 %

Dengan Judul :

Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyam Damai

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 03 Januari 2022

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : ALMA BONITA HOKIANETTA

NPM : 161010141

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 07 September 1998

Program Studi/Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA

Judul : HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 6 Januari 2022

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL D95AJX617447423

ALMA BONITA HOKIANETTA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ALMA BONITA HOKIANETTA

NPM : 161010141

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Judul Skripsi : Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
18 November 2021	Perbaiki Cara Penulisan Teknik Penulisan dan Kutipan Tambah Buku Referensi Tambahkan Body Note	
25 November 2021	Perbaiki Penulisan Hasil referensi buku Perbaikan Body Note	
16 Desember 2021	Abstrak dan kata pengantar Tinjauan pustaka Perbaiki Penulisan	
30 Desember 2021	Acc pembimbing untuk ujian skripsi	

Pekanbaru, 6 Januari 2022

Mengetahui,

Dr. Rosyidi Hamzah, SH.,MH

Wakil Dekan 1

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

FS 671471

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

ALMA BONITA HOKIANETTA
NPM: 161010141

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., MIS

Mengetahui

Dekan

Dr.Musa, S.H.,M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 791 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang

1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang tetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dkti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Menunjuk
   Nama : **Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S**
   NIDN / NPK : **12 10 02 486**
   Pangkat/Jabatan : **Penata / III/c**
   Jabatan Fungsional : **Lektor**
   Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
   Nama : **Alma Bonita Hokianetta**
   NPM : **16 10 10 141**
   Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
   Judul skripsi : **Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 13 Desember 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Depertemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

NOMOR : 007 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
   a. Nomor : 232/U/2000
   b. Nomor : 234/U/2000
   c. Nomor : 176/U/2001
   d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
   a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
   b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
   c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

   N a m a : Alma Bonita Hokianetta
   N.P.M. : 161010141
   Program Studi : Ilmu Hukum
   Judul Skripsi : Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai

   Dengan susunan tim penguji terdiridari :
   Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S : Ketua merangkap penguji materi skripsi
   Dr. Desi Apriani, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistimatika
   Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
   Anggraini Dwi Milandry, S.H.,M.H : Notulis
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

   Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 17 Januari 2022
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

FS 671471

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, ***Nomor : 007/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 17 Januari 2022***, pada hari ini ***Rabu, 19 Januari 2022*** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	:	Alma Bonita Hokianetta
N P M	:	161010141
Program Study	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai
Tanggal Ujian	:	19 Januari 2022
Waktu Ujian	:	09.00-10.00 WIB
Tempat Ujian	:	Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:	3,66
Predikat Kelulusan	:	Sangat Memuaskan

Dosen Penguji	**Tanda Tangan**
1. Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.I.S	1.
2. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H	2.
3. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H	3.
Notulen	
4. Anggraini Dwi Milandry, S.H.,M.H	4.

Pekanbaru, 19 Januari 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

HUKUM PERKAWINAN SIRI DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP ISTRI DAN ANAK DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI

Dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan yang sah berdasarkan aturan hukum di Indonesia adalah Perkawinan yang memenuhi rukun serta syarat dari perkawinan berdasarkan kepercayaan masing - masing serta dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah. Dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia tidak dikenal adanya perkawinan siri karena merupakan perkawinan yang tidak diakui oleh Negara dikarenakan tidak dicatatkannya perkawinan pada lembaga yang berwenang. Disinilah Penulis meneliti mengenai hukum perkawinan siri dalam KHI dan perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Jenis penelitian pada skripsi penulis adalah normative-empiris yang memicu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Marpoyan Damai, beliau mengatakan bahwa perkawinan siri yang terjadi di Kecamatan Marpoyan Damai di faktor seperti wanita hamil di luar nikah, masa pandemic, masih di bawah umur, poligami. Setelah penulis melakukan penelitian lebih lanjut penulis mendapatkan faktor faktor lainnya, seperti faktor keluarga dan ditinggal oleh suami terdahulu. Adanya perkawinan siri sendiri menimbulkan konsekuensi terhadap istri dan anak Bagi istri akan mendapatkan konsekuensi seperti tidak berhak atas nafkah suami, bukanlah merupakan istri sah berdasarkan hukum, sehingga jika terjadi permasalahan suami dapat dengan mudah tidak mengakui istrinya tersebut, perkawinan yang dilalui tidak memiliki kepastian hukum, sehingga rentan akan kekerasan dalam rumah tangga. Istri pun tidak berhak atas harta bersama saat perceraian. Untuk anak, akan menimbulkan konsekuensi yakni anak hasil dari perkawinan siri bukanlah anak sah atau dianggap anak di luar nikah. Ayahnya bukanlah ayah sah di mata Negara. Dengan kata lain, anak akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. Seperti tidak adanya nama ayah dalam akta kelahiran anak, maupun dalam dokumen–dokumen Negara atas nama anak tersebut. Anak juga tidak berhak atas warisan, serta nafkah dari ayahnya. Anak juga kehilangan hak – hak pemeliharaan dari ayahnya jika ayahnya tidak bertanggung jawab atas keluarga tersebut. Anak dan Istri juga menjadi bahan cibiran keluarga, masyarakat, serta ruang lingkup sekitar.

Kata Kunci: **Perkawinan Siri, Konsekuensi bagi istri, Konsekuensi bagi anak.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT

SIRI MARRIAGE LAW AND CONSEQUENCES FOR WIFE AND CHILDREN IN MARPOYAN DAMAI DISTRICT

In the Compilation of Islamic Law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, a legal marriage based on the rule of law in Indonesia is a marriage that meets the pillars and requirements of marriage based on their respective beliefs and is registered with the Marriage Registrar. In the law that applies in Indonesia, it's not known that there're unregistered marriages because they are marriages that are'nt recognized by the State because marriages are not registered with the authorized institution. Here, author examines law of unregistered marriage from CIL and that occurred in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City. The type of research in the author's thesis is normative-empirical which triggers the legal norms contained in the legislation, namely Law Number 1 of 1974 concerning marriage and the Compilation of Islamic Law, while the empirical approach is an approach by looking at a reality that occurred. From the results of an interview with the head of KUA Marpoyan Damai, he said that the unregistered marriage that occurred in Marpoyan Damai District was due to factors such as pregnant women before marriage, the pandemic period, being underege, polygamy. After the authors conducted further research, the authors found other factors, such as family factors and the previous husband left the wife. The existence of an unregistered marriage itself has consequences for the wife and children resulting from the marriage. For the wife will get consequences such as not being entitled to a husband's maintenance, not being a legal wife under the law, so that if a problem occurs the husband can easily disown his wife, the marriage they go through does not have legal certainty, so they are vulnerable to domestic violence. The wife is not entitled to joint property at the time of divorce. For children themselves, there will be consequences, namely children resulting from unregistered marriages are not legal children or are considered children out of wedlock. The father he knew as his biological father was not his real father in the eyes of the State. In other words, the child will lose the legal relationship with the father. Such as the absence of the father's name in the child's birth certificate, as well as in state documents on behalf of the child. Children are also not entitled to inheritance, as well as a living from their father. The child also loses the rights of care from the father if the father is not responsible for the family. As well as psychologically the wife and childrend will also have problems due to the many blasphemy, slander and scorn received.

***Keywords*: Siri marriage, Consequences for wife, Consequences for children.**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Judul yang disajikan pada skripsi ini adalah: **"Hukum Perkawinan Siri Dan Konsekuensinya Terhadap Istri Dan Anak Di Kecamatan Marpoyan Damai".**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL**. selaku Rektor Universitras Islam Riau;
2. **Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. **Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, SH., MH.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. **Ibu Dr. Desi Apriani SH., MH,**selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
5. **Bapak Dr. S. Parman, SH., M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

6. **Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag, MIS**, selaku Kepala Bagian Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
7. **Bapak Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D,** selaku dosen penguji I, **Bapak Zulfikri Toguan, S.H., M.H.** selaku dosen penguji II, dan **Ibu Selvi Harvia Santri, SH., MH**. selaku Dosen Penguji III yang telah banyak memberikan saran dan masukan sewaktu penulis melakukan seminar poposal;
8. **Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H, Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H,** selaku dosen penguji dalam sidang skripsi penulis, yang mana telah memberikan banyak saran dan masukan terhadap hasil skripsi penulis;
9. **Kepada Ibu Esy Kurniasih, S.H., M.H.** selaku notulen dari seminar proposal penulis;
10. **Ibu Anggraini Dwi Milandry, S.H., M.H,** selaku notulen dari sidang skripsi penulis;
11. **Kepada Bapak/ Ibu Dosen dan Staf Pegawai**, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya, membantu serta memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan sampai penulis selesai menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
12. **Kepada yang tersayang Papa, Mama, Kak Dinda, Albra dan Dewa**, yang senantiasa mengiringi penulis dengan dengan do'a dan kasih sayang,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyemangati dan mengingatkan penulis, serta merawat penulis dengan kesabaran, membesarkan dan mengajarkan segala hal baik untuk hidup dan kehidupan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatNya, rezeki, kesehatan;

13. **Kepada Pakde Novi, Bude Hanum, Bude Tatri, Bude Nanik, Tante Sinto, Om Indra, Mas Defa, Mba Mayang, Mas Edo, dan sepupu lainnya,** yang selalu membantu penulis dalam hal moral maupun materil dalam penyelesaian di bangku perkuliahan.
14. **Kepada abang ipar, Bang Robin Pangihutan Simamora, SH**, **beserta keluarga,** yang senantiasa memberikan dukungan, mendoakan, serta berbagi ilmu kepada penulis, semoga dilancarkan segala urusannya dan diberi kesehatan.
15. **Kepada Para Narasumber yang bersedia untuk penulis wawancarai.** Terimakasih atas waktu berharganya dan semangat selalu;
16. **Kepada Opung Petra dan Opung Boru, Tulang Ronald Sihotang, Tulang Petra Sihotang,** yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
17. **Sahabat - sahabat seperjuangan, Arum Putri Yanti, S.H., Ayatul Nissa, S.H, Deri Ayu Putri, S.H, Tuti Yensefli Rahmi, S.H.** yang banyak membantu serta memberikan dukungan moral kepada penulis, semoga Allah membalas kebaikan kalian;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

18. **Sahabatku tersayang, Rita Septianda, A.Md.RMIK,** yang selalu ada sejak penulis SMA sampai sekarang. Terimakasih atas do'amu dan semangatmu Ummu Ibrahim;
19. **Kepada sahabat - sahabat SMA penulis, Adilla Pratiwi, S.T, Eticha Chonesty, S.Pd, Misbah Nurfitri, Reficha Hendri, S.E, Siti Nurul Sintia, S.Pd** yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu berbagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Pekanbaru, 1 Januari 2022

Penulis

Alma Bonita Hokianetta
NPM : 161010141

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..…… i

PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT ……..… ii

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI ……... iii

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ……... iv

SK PEMBIMBING …… v

SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI …….. vi

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU ……..…….. vii

ABSTRAK …… ix

ABSTRACT …… x

KATA PENGANTAR …….. xi

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …… 1

B. Rumusan Masalah ……..... 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……. 7

D. Tinjauan Pustaka …… 8

E. Konsep Operasional …… 9

F. Metode Penelitian …….. 12

Bab II PERKAWINAN DAN PERKAWINAN SIRI

A. Perkawinan Secara Umum …….. 15

1. Pengertian dan Dasar Perkawinan ……. 15

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Hukum Melakukan Perkawinan 18

3. Syarat dan Rukun Perkawinan 24

4. Tujuan Perkawinan 27

5. Prinsip – Prinsip Perkawinan 28

6. Akibat Perkawinan 31

7. Hikmah Pernikahan 32

B. Perkawinan Siri 34

1. Pengertian Perkawinan Siri 34

2. Dasar Hukum Nikah Siri 36

3. Macam – Macam Perkawinan Siri 38

a. Pernikahan tanpa wali 38

b. Pernikahan tanpa saksi 38

c. Pernikahan yang tidak dicatatkan 39

4. Faktor Terjadinya Nikah Siri 40

5. Pencatatan Perkawinan 44

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Siri di Kecamatan Marpoyan Damai 46

1. Faktor Perkawinan Siri di Kecamatan Marpoyan Damai 47

2. Pandangan Ulama Mengenai Perkawinan Siri 54

B. Konekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri dan Anak 56

1. Kedudukan Istri 58

2. Kedudukan Anak 60

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 76

DAFTAR KEPUSTAKAAN 78

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejatinya makhluk dibumi tercipta sebagai pemimpin untuk seluruh semesta ini. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk ciptaan yang cerdas, maka membutuhkan regenerasi sebagi bentuk mempertahankan keturunannya untuk selalu eksis, maka manusia membutuhkan lawan jenisnya untuk memperoleh keturunan demi keberlangsungan hidup secara turun - temurun.

Keberlangsungan hidup manusia sejatinya harus diakui sebagai hak dasar yang tidak boleh digugat oleh siapapun karena ini merupakan sesuatu yang asasi. Oleh karenanya harus diakui oleh konstitusi Negara bahwa untuk mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan harus mendapat jaminan dari Negara, demi terjaminnya keberlangsungan hidup dan mendapatkan keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan.

Indonesia sebagai Negara hukum mengakui perkawinan sebagai hak dasar yang asasi dalam konstitusi sebagaimana yang pada pokoknya Negara mengakui hak warga negara untuk melangsungkan perkawinan untuk mempertahankan keturunan

secara turun menurun melalui perkawinan yang sah, sehingga eksistensinya tetap terjaga, mampu membawa kemaslahatan umat dan seluruh semesta.

Untuk itu diperlukan sebuah lemabaga perkawinan sebagai pintu untuk mempertahankan eksistensinya, sehingga dikeluarkan aturan perkawinan yang mampu menentukan keselarasan, keserasian antara apa yang termaktub di dalam undang - undang dengan apa yang yang terjadi dimasyarakat, sehingga aturan itu tidak saja sebagai sebuah teks yang berisi teori, namun harus sesuai dengan apa yang tertulis dan apa yang berlangsung di masyarakat.

Undang - Undang Perkawinan menghendaki perkawinan itu harus tertulis sebagai suatu asas dan diakui oleh agama dan Negara. Pada kenyataannya di masyarakat dikenal dan terjadi perkawinan yang dikenal oleh masyarakat dengan kawin dibawah tangan atau nikah sirri. Nikah sirri dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak sesuai dengan aturan perundang - undangan atau perkawinan tidak dilakukan pada pejabat Negara berwenang. Keberlangsungan kawin di bawah tangan terkadang menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat, dengan alasan tidak mau mengikuti aturan yang dibuat oleh Negara atau kesulitan dalam prosedur pernikahan yang dibuat Negara atau bisa dikatakan tidak mau ribet.

Namun satu hal yang pasti bahwa bilamana pernikahan sirri terjadi akan ada pihak - pihak yang dirugikan, sehingga Negara meng-*cover* hal tersebut dalam sebuah aturan perundang - undangan perkawinan di bawah tangan terkadang menjadi hal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lumrah dengan alasan menghindari perizinan dan perbuatan tercela ditengah masyarakat. Namun pemerintah melalui badan - badan pemerintahan harus menanggapi serius masalah tersebut, sehingga terciptanya amanat dari ketentuan perkawinan.

Aturan perkawinan mengkhendaki suatu perbuatan menentukan keabsahan suatu perkawinan yang mestiterlaksanadalam perkawinan yakni memiliki persyaratan yang wajib dipenuhi masing - masing pihak. Artinya calon suami dan isteri harus melangsungkan perkawinan menurut keyakinan agama serta harus dicatatkan pada pejabat yang berwenang. Pencataan perkawinan sama halnya dengan pencatatan kelahiran dan kematian sebagai bentuk bukti administrative yang diperlukan oleh Negara.(Amir Syariffunn din, 2009: 25)

Amanat aturan pernikahandimana tertulispada Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 1 sebagai berikut :

> Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang prian dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal ini bermakna suatu perkawinan sah bilamana suami-isteri melangsungkan perkawinan menurut keyakinan dan kerohanian berdasarkan KYME. Demikian pula terhadap sahnya perkawinan menurut aturan hukum, yakni UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menegaskan :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tiap – tiap perkawinan dicatatmenurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Norma hukum yangmana berlaku pada aturan tersebut, bermakna perkawinan itu sah dan daikui oleh Negara jika dicatat pada KUA bagi warga masyarakat beragama Islam serta di lembaga pencatatan sipil untukmasyarakat beragama non-muslim. Hal ini dapat dilaksanakan dalam rangka tertib administrative dan kepentingan Negara untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat yang berkehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Dan juga disebutkan dalam KHI pada Pasal 5 sampai 6 tentang pencatatan perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam yakni :

Pasal 5

1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Nikah sebagaimana yang diataur dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang - Undnag Nomor 32 tahun 1954.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 6

1) Setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatata Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bagi masyarakat yang tidak melakukan pencatatan pernikahan itu dianggap sebagai perkawinan yang tidak pernah ada. Konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan menyebabkan kerugian bagi keluarga dari isteri, keturunan dari hasil pernikahan, serta isteri yang paling dirugikan. Meski demikian, perihal nyata yang terjadi dimasyarakat perkawinan dibawah tangan menjadi sebuah fakta yang tidak pernah dapat dibantah adanya oleh warga masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. (Harpani Matnuh Jurnal PKN, 2016:889)

Setelah para pelaku melakukan perkawinan maka akan dilahirlah keturunan yakni anak maka terhadap anak juga akan diatur dalam UU Perkawinanmengenai kedudukan anak yang tercantum di Pasal 42 yang menegaskan bahwa anak yang sah itu merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah di mata hukum

Kedudukan anak juga diatur pada ketentuan hukum perkawinan yang berlaku.Pada aturan ini menegaskan bahwa anak yang dinyatakan sah terebut hanya berasal dari perkawinan yang sah dimata negara. Keturunan yang berasal dari perkawinan yang tak tercatat semata-mata mendapatikatan keperdataan dengan ibu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

beserta keluarganya, sehingga ini juga akan berakibat kerugian bagi keturunan yakni anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua yakni bapaknya.

Oleh karena pentingnya pernikahan yang sah setiap orang perlu memperhatikan dengan seksama aturan perkawinan, fenomena yang terjadi dimasyarakat banyak perkawinan yang terjadi dibawah tangan sehingga harus mendapat perhatian dari seluruh instansi yang berwenang.

Pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatat dalam kehidupan warga masyarakat disebut dengan nikah sirri atau nikah dibawah tangan. Bagi masyarakat yang mengindahkan pencatatan pernikahan itu akan diibaratkan sebagai perkawinan yang tidak pernah ada. Konsekuensi dari perkawinan dibawah tangan menyebabkan kerugian bagi keluarga dari isteri, keturunan dari hasil pernikahan yakni keturunan dari hasil pernikahan, serta isteri yang paling dirugikan.. Namun demikian, hal nyata yang terjadi dimasyarakat perkawinan dibawah tangan menjadi sebuah fakta yang tidak pernah dapat dibantah adanya oleh warga masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia. (Harpani Matnuh Jurnal PKN, 2016:889)

Secara teoritis dalam hal dilaksanakannya perkawinan dibawah tangan telah melanggar UU Perkawinan dalam pasal 2 ayat (2). Bahwa ketentuan itu mengamanatkan pernikahan itu wajib dicatatkan pada pejabat pengawas perkawinan, sehingga menurut pandangan penulis bahwa tidak adanya sinkronisasi antara apa yang termaktub dalam undang - undang dengan apa yang terjadi sebagai fakta

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilapangan. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) mengenai keabsahan perakawinan adalah sesuatu yang tak bisa dipisahkan. Bagaikan 2 sisi mata uang bahwa perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum perkawinan agama serta keyakinannya masing - masing, dan disisi lain wajib dicatatkan oleh lembaga pencatatatn perkawinan. Hal inilah sebagaimotivasi penulis untuk membuat skripsi ini.

Maka karennya, dari paparan yang penulis kemukakan pada bagian yang terdahulu maka judul dari karya ilmiah ini adalah **"Hukum Perkawinan Siri dan Konsekuensinya Terhadap Istri dan Anak di Kecamatan Marpoyan Damai"**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana konsekuensi dari perkawinan siri terhadap istri dan anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah tentulah mempunyai sebuah tjuan dan keguanaan, maka tujuan dalam karya ilmiah ini adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Mengetahui kedudukan hukum terhadap perkawinan siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Memahami permasalahan hukum yang timbul dari perkawinan siri terhadap anak dan istri yang dilahirkan dari hasil perkawinan di Kecamatan Marpoyan Damai.

Adapun manfaat kegunaan dibuatnya karya ilmiah sebagai berikut :

1. Bagi penelitian lain dalam mengetahui kedudukan hukum terhadap kawin di bawah tangan pasca terbitnya KHI.

2. Bagi penelitian bagaimana konsekuensi yang ditimbulkan dari perkawinan siri terhadap anak dan istri pasca lahirnya KHI di Kecamatan Marpoyan Damai

3. Agar masyarakat paham dan tidak buta hukum terhadap nikah siri.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah untuk menemukan serta mendalami materi, rancangan, serta penyamarataan yang digunakan sebagai dasar teori bagi penelitian. Dasar teori ini memiliki landasan yang kuat, bukan sekedar pendapat. Selain itu juga memperkenalkan metode bagaimana mengintrepretasikan hasil penelitian dan mengkoneksikan dengan hasil penelitian yang pernah ada.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pada buku yang berjudul *Nikah Siri Apa Untungnya?*karangan Happy Susanto yang menjelaskan mengenai pernikahan siri akan mengakibatkan banyak efek negative. Dampak menyakitkan persaan dan kedudukan isteri terkhusus dalam faktor hukum. Banyak kerugian yang didapatkan istri jika nikah siri tidak mendapatkan pengakuan hukum. Terlebih isteri mendapatkan dampak sosial, ekonomi dan lain – lain. Dan juga berdampak pada kehidupan sang anak, buah cinta dari perkawinan siri tersebut.

Lalu pada buku dengan judul*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*karangan Wasman dan Wardah Nuroniyah menjelaskan bahwa pada UU Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) menjelaskan : "*Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku"*.Di KHI sendiri menegaskan dicatatnya perkawinan merupakan suatu kewajiban, sebagaimana dikatakan pada Pasal 5, dan dampak dari masalah tersebut disebutkan pada Pasal 6 ayat (2), yaitu "*perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan huum"*lalu perihal ini diperkuat oleh Pasal 7 ayat (1).

E. Konsep Operasioal

Hukum menurut Van Doornialah sebuah rencana yang dirancang untuk mengatur perilaku manusia, namun manusia justru jatuh di luar rencana yang dirancang untuk mereka. Hal ini dapat terjadi karena faktor pengalaman, pendidikan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tradisi, dan lain - lain yangmana dapat memengaruhi dan menciptakan perilaku manusia.

Pengertian perkawinan dalam Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 menurut Pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KYME.

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang begitu kokoh atau *miitsaaqongholidhan* untukumat manusia menaati perintah Allah dan bernilai ibadah jika umat manusiamelakukannyaatas nama Allah.

Jika dilihat pada KUHPerdata tidak ada ketentuan mengani pegertian perkawinan. Oleh karena itu, para Ahli Hukum mengemukakakn konsep pernikahanyang berbentuk suatu teori, sebagai berikut :

i. Scholtenmengatakan: "Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang di akui oleh negara".
ii. Rien G. Kartasapoetra mengatakan : "perkawinan adalah hubungan hukum seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi memenuhi syarat- syarat perkawinan untuk jangka waktu yang selama mungkin".
iii. Subekti mengatakan : "Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki - laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama"

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Siri merupakan bahasa Arab yakni *Sirr* yang artinya ialah diam – diam atau rahasia.

Nikah Siri adalah pernikahan yang tidak tercatat di KUA, atau dapat disebut nikah yang tidak wajar (nikah di bawah tangan). Oleh karena itu, secara etimologi, pernikahan seperti ini diartikan sebagai nikah yang dilangsungkan secara diam - diam atau sembunyi - sembunyi.

Konsekuensi ialah akibat yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan.

Pengertian anak sendiri tidak tercantum dalam KUHPerdata, namun menurut Pasal 330 ditetapkannya umur bagi orang yang dikatakan dewasa. Dengan demikian anak ialah seseorang yang belum dewasa dimana belum menginjak umur legal sebagai subjek hukum yang telahterapapar dalam perundang - undangan yang berlaku.

Isteri adalah wanita yang melakukan pernikahan dengan lawan jenisnya. Wanita yang melakukan pernikahan dengan pria dalam sebuah perkawinanyang mana kedudukannya sebagai isteri dan pasangannya ialah seorag suami.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

F. Metode Penelitian

Dari permasalahan dasar yang telah dijabarkan sebelumnya, susnan metode penelitian yang akan diterapkanialah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berpusat pada jenis penelitian normative-empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan antara penilitian normative yang didapatkan dari kepustakaan yang selanjutnya di dukung dengan penambahan data berdasarkan penelitian empiris yangmana disini penulis dapatkan dari hasil wawancara.

2. Bahan – Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber utama dalam penelitian. Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni UUD 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta KHI.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap, memperkuat serta menjelaskan dari bahan hukum utama atau primer. Bahan hukum yang penulis gunakan yakni hasil penelitian skripsi, tesis dan disertasi, jurnal, atau majalah ilmiah yang terakreditasi dan diterbitkan oleh lembaga pendidikana, lembaga pemerintahan atau lembaga lainnya, buku – buku mengenai materi proposal penulis, yakni mengenai

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perkawinan siri serta melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, yang merupakan wawancara dan pengamatan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat di pertanggungjawabkan, maka disini penulis melakukan teknik pengumpulan data dalam skripsi yakni melakukan wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memberikan jawaban.

Dalam wawancara ini, saya selaku penulis mengaplikasikan jenis wawancara tidak berencana, yakni dimana dalam wawancara peneliti tidak terlalu terkait pada aturan – aturan yang ketat. Dalam wawancara ini, penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai serta 5 responden yang melakukan perkawinan siri dan ustadz yang terdapat di lingkungan penulis.

4. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, data dapat dijabarkan secara kualitatif. Analisis secara kualitatif ialahinformasi data yang berupa kalimat verbal, bukan berupa lambang atau angka. Data kualitatif diperoleh melalui proses dengan menggunakan teknik analisis mendalam yangmana tidak secara langsung. Penelitian kualitatif berfokus pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

prinsip - prinsip umum dibalik kenerja gejala atau pola dalam kehidupan manusia dengan menganalisis fenomena sosial dan budaya dengan menggunakan budaya masyarakat yang relevan untuk memperoleh gambaran tentang pola umum yang ada. Tahapan analisis diawali dari pengumpulan data, pengelolahan data dan yang terakhir penyajian data. Disini penulis berusaha menganalisisarti yang terdapat dalam UU tentang Perkawinan dan KHI mengenai Perkawinan Siri.

4. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam karya ilmiah ada 2 macam, yakni induktif dan deduktif. Metode penelitian induktif adalah cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus. Disini penulis melakukan metode deduktif yang mana merupakan cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat umum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

PERKAWINAN DAN PERKAWINAN SIRI

A. Perkawinan Secara Umum

1. Definisi dan Dasar Perkawinan

Berdasarkan etimologis, perkawinan berasal dari bahasa Arab yakni An - nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini muncul di Al-Qur'an dan hadist. *Al – nikah* sendiri memiliki arti *Al - wath'i, Al - tadakhul Al - jam'u* yang beramakna bersetubuh, hubungan suami isteri, berkumpul, jima' serta akad.

Sedangkan berdasarkan terminologis, perkawinan adalah akad yang memperbolehkan adanya istimta' (persetubuhan) dengan perempuan yang berstatus istri, selama seorang perempuan yang menjadi istrinya bukanlah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi.

Menurut beberapa ulama Hanafi, nikah adalah akad yang memberikan utilitas yang mana menimbulkan perasaan untuk bersenang – senang secara sadar (sengaja) antara wanita dan seorang pria berstatus suami-istri, terutama untuk memenuhi kenikmatan biologis. Sedangkan pVAandangan madzhab Maliki, nikah yakni sebuah pernyataan atas akad yang dijalankan dan ditujukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual semata. Oleh madzhab Syafi'i, nikah merupakan akad untuk bersetubuh

dengan menggunakan lafal "*inkah*" atau *tazwij* atau dan lain - lain. Dan bagi madzhab Hanabi, mengartikan nikah seperti akad yang dilaksanakan dengan memakai kata *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh kesenangan.

Dalam persoalan mengenai perkawinan, para ahli fiqih mendefinisikan "nikah" dengan perumpamaan. Ahli fiqih saling berbeda pendapat tentang arti khiasan dalam pernikahan. Imam Abu Hanifah medefinisikan dengan arti bersetubuh sedangkan Imam Asy-syafi'i mendefinisikan dengan arti mengadakan perjanjian perikatan. Perbedaan akan pengertian pernikahan inilah yang merupakan cikal bakal timbulnya perbedaan - perbedaan pendapat lainnya dalam ruang lingkup pernikahan pada umumnya.

Menurut pemikiran Sulaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak serta kewajiban dan tolong – menolong antara pria dan wanita yang mana keduanya bukanlah muhrim. Sedangkan menurut Mahmud Yunus, perkawinan ialah akad antara calon suami untuk memenuhi hajat jenisnya berdasarkan syari'at. Akad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan Kabul ialah balasan dari akad yang diucapkan calon suami atau wakilnya.

Sedangkan menurut bahasa Indonesia perkawinan memiliki makna yang serupa. Dimana pengertian perkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Maha Esa.

Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah, dan yang melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Sayuti Thalib, perngertian pe rkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dan wanita (Sayuti Thalib, 1986:47). Bagi Soebekti, perkawinan merupakan pertalian sah antara lelaki dan perempuan untuk waktu yang lama. Undang – Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian Pasal 26 Burgerlijk Wetboek (Soebekti 1991:23)

Sayyid Muhammad Husain menguraikan bahwa dalam Islam perkawinan merupakan lafal suatu akad antara perempuan dan laki-laki yang mana terbentuk hubungan suami istri di antara keduanya, yangmana hak dan kewajibannya di atur dalam Undang – Undang. Baik terhadap dalam syariat atau dalam undang- undang umum, yang berbeda sesuai dengan perbedaan agama dan Undang - Undang.

Untuk dasar hukum dari perkawinan di Indonesia sendiri terdapat Perundang – undangan yang mengaturnya, yakni Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang mana undang – undang ini bmengatur segala hal mengenai perkawinan. Mulai dari pengertian hingga perkawinan campuran. Meskipun demikian, Indonesia rupanya turut mengadopsi perkawinan dari Al-Qur'an dan hadist, yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI sendiri, perkawinan terdapat pada Buku ke I, yang memiliki 19 bab. Dalam KHI sendiri, mengatur berbagai macam hal dalam perkawinan. Mulai dari peminangan hingga

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Isteri yang ditinggal mati suami.

Meski demikian, sebelum adanya UU Perkawinan dan KHI, Indonesia telah mengatur perkawinan pada Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 1, yang menyebutkan :

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah

2. Hukum Melakukan Perkawinan

Meski dasarnya Islam menganjurkan pernikahan, namun dalam prespektif realisasi pernikahan, pernikahan dapat menjadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berikut penjelasannya :

a. Perkawinan yang wajib

Bila seseorang memiliki keinginan besar untuk melakukan perkawinan serta memiliki kualitas akannya dan terpenuhi lahir dan bathinnya akan perkawinan, maka wajib hukumnya ia melakukan perkawinan. Apabila tidak atau ditunda hasratnya untuk menikah, maka akan mudah baginya untuk tergelincir dalam dosa seperti zina.

Alasan wajibnya seseorang seperti ini wajib melakukan perkawinan adalah agar menjaga diri dari perbuatan haram seperti zina. Dan bila ia menganggap menikah adalah satu-satunya jalan baginya untuk menjaga dirinya, maka perkawinan wajib dilaksanakan. *Qa'idah fiqhiyah*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengatakan bahwa sesuatu yang mutlak diperlakukan untuk menjalankan suatu kewajiban, hukumnya adalah wajib. Atau dengan kata lain, apabila suatu kewajiban tidak terpenuhi tanpa adanya suatu hal, hal itu wajib pula hukumnya. Penerapan kaidah iin dalam persoalan perkawinan yakni apabila seseorang hanya dapat menjaga dirinya dari perbuatan zina dengan dilaksanakan pernikahan, baginya perkawinan itu wajib hukumnya baginya.

b. Perkawinan yang sunnah

Bagi lelaki maupun wanita yang sudah memiliki keinginan besar untuk berumah tangga, serta memiliki kemampuan untuk mengemban segala hal dalam perkawinan, namun jika ia tidak atau belum melakukan perkawinan ia tidak khawatir akan berbuat zina, hal ini sunnah baginya melakukan pernikahan.

Alasan perkawinan ini sunnah berdasarkan ayat dalam Al – Qur'an serta hadist – hadist sebagaimana yang dijelaskan dalam hal Islam menganjurkan perkawinan seperti di atas. Banyak ulama berpendapat berdasarkan dari ayat – ayat Al-Qur'an dan hadist – hadist, hukum dasar pernikahan ialah sunah.

Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Ulama – ulama mazhab Dhahiri berpendapat bahwa perkawinan wajib dilaksanakan bagi orang yang telah mampu tanpa peduli

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

adanya kekhawaitran akan berbuat zina atau tidak bila tidak menikah.

c. Perkawinan yang haram

Haram perkawinan tersebut dilaksanakan untuk orang yang belum berhasrat untuk menikah serta belum adanya kemampuan untuk melangsungkan serta mengemban kewajiban – kewajiban dalam perkawinan, sehingga apabila menikah dikhawatirkan berdampak menyusahkan istri dan keluarga.

Hadist nabi menjelaskan agar manusia jangan membuat susah diri sendiri maupun orang lain. Salah seorang ulama penting mazhab maliki mengemukakan bahwa bila calon suami memahami tidak adanya kemampuan dalam dirinya untuk memberikan nafkah dan memberikan mahar (mas kawin) untuk istrinya, ataupun keharusan lainnya yang akan diberikan menjadi hak istri. Kecuali jika ia menjelaskan keadaanya kepada calon istrinya, jika tidak maka haram baginya untuk menikah dengan wanita pilihannya atau dapat bersabar sampai memahami ia hendak dapat mencukupi hak – hak isterinya, barulah ia dapat melaksanakan penikahan.

Al – Qurthubi menjelaskan pula bahwa orang yang mengetahui dirinya terdapat penyakit yang dapat menghalangi kemungkinan melakukan hubungan dengan calon pasangan harus memberikan informasi selengkapnya tentang kondisnya tersebut kepada calon istri agar tidak ada yang merasa ditipu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Perkawinan yang makruh

Perkawinan tersebut berhukum makruh bila seseorang mampu melaksanakan perkawinan dari secara materiil, serta mampu baik lahir dan bathin dan yakin tidak sesat dalam perbuatan zina. Namun memiliki kekhawatiran tidak mampu memenuhi hak – hak istrinya akan dirinya, meski hal ini tidak berdampak menyusahkan istri. Seperti jika laki – laki tersebut kaya namun tidak berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan.

e. Perkawinan yang mubah

Pernikahan dapat berhukum mubah untuk calom mempelai yang memiliki materiil yang cukup, tetapi jika ia belum menikah, tidak ada kekhawatiran hendak melakukan zina serta jika nikahpun tidak merasakan kekhawatiran akan mengabaikan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan dilaksanakan hanya untuk bersenang senang serta memenuhi nafsu, bukan untuk memenuhi tujuan dilaksanakannya pernikahan. (Syauqi Nawawi, 2002 : 112)

Seseorang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta, tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun membujang lama dan tidak dikhawatirkan berbuat jahat terhadap istri. Para ulamadalam hal ini berbeda pendapat tentang hukum nikahnya:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pendapat pertama, fardu menurut kaum Zhahiriyah, dengan alasan pertama, Allah dan Rasul- Nya memerintahkan menikah dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Pendapat ini diperkuat dengan praktik Nabi Saw dan para sahabat yang melakukannya dan tidak ada yang memutuskannya. Andai kata mandub atau sunnah tentu ada yang meninggalkannya.

Kedua, Nabi Salallahu 'alaihi wasalam melarang beberapa sahabat yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih – lebihan. Sebagaimana dalam hadist shahih al – Bukhari dan Muslim : Bahwa ada tiga golongan datang ke rumah para istri Nabi Saw seraya bertanya tentang ibadah beliau, setelah diberitahu, seolah-olah mereka merasa sedikit ibadah mereka. Mereka berkata, "Dimana posisi kita dari Nabi Saw, padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lalu maupun yang akan datang?" Salah satu di antaramereka berkata : "adapun aku sungguh akan melaksanakan sholat malam selamanya". Berkata yang lain: " saya akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka." Dan berkata yang lain: "Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya." Dalam hadits Rasulullah menolak kemauan sebagian sahabat dengan penolakan yang kuat sampai beliau lepas tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Saw melarang membujang larangan membujang menunjukkan haram karena meninggalkan yang wajib. Dalil ini menjadi dasar larangan tidak menikah bagi umat Islam.

Ketiga, seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan maksiat zina. Akan tetapi yang menjadi wajib adalah berhati-hati terhadap dirinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan memeliharanya dengan dengan menikah.

Pendapat Kedua, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli dan makan minum. Demikian pendapat Asy-Syafiiyyah dan orang-orang yang sepakat dengan pndapat mereka. Alasan yang dikemukakan mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil rasional, pernikahan itu urusan duniawi, yakni memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, berpakaian. Seseorang yang memenuhi kebutuhan biologisnya dengan pernikahan berarti sebagaimana memenuhinya dengan makan dan minum. Orang yang melakukannya berarti mempertahankan instinknya.

Oleh karena itu, nikah berlaku bagi orang mukmin dan selain mukmin, orang baik dan orang jahat, dalam hal untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Itulah di antara ciri-ciri mubah, tidak dituntut syara dan tidak dilarang, dibiarkan berjalan sesuai dengan alur kondisi seseorang, baik secara psikologi maupun tradisi.

Pendapat ketiga, sunnah muakkadah menurut jumhur, mayoritas ulama seperti hanafiyah, malikiyah, dan hanabilah, hukum nikah seseorang dalam keadaan normal adalah sunnah muakkadah. Alasan yang yang dikemukakan mereka, bahwa Nabi saw melakukan dan menganjurkannya, tetapi tidak mewajibkan kepada setiap individu dan manusia sebagaimana dalam fardu dan wajib. Demikian itu sebagai saksi bahwa perkawinan dalam kondisi normal mandub dan mustahab, tidak benar tuduhan fardu dan wajib.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun ialah suatu hal yang wajib ada serta menetapkan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rantaian ibadah tersebut. Sedangkan syarat yakni sesuatu yang wajib ada dan menetapkan sah atau tidaknya suatu ibadah, tetapi hal- hal tersebut tidak termasuk dalam rantaian ibadah tersebut

Dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tertulis rukun serta syarat perkawinan, yakni :

Rukun :

a. Calon suami, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   - Beragama Islam
   - Laki – Laki
   - Jelas Orangnya
   - Dapat memberikan persetujuan
   - Tidak terdapat halangan perkawinan
b. Calon istri, dengan syarat – syarat sebagai berikut :
   - Beragama Islam
   - Perempuan
   - Jelas orangnya
   - Dapat dimintai persetujuannya
   - Tidak terdapat halangan perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Wali pernikahan, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- Laki – Laki
- Dewasa
- Dapat diminta hak perwaliannya
- Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Ijab dan Kabul, dengan syarat -- syarat sebagai berikut :

- Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- Memakai kata – kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- Saling bersambungan antara ijab dan qabul
- Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

e. 2 orang saksi, dengan syarat – syarat sebagai berikut :

- Minimal 2 orang saksi
- Hadir dalam ijab dan qabul
- Dapat mengerti maksud akad
- Islam
- Dewasa

Syarat Perkaiwnan:

a) Islam,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Bukan Mahram,

c) Wali nikah,

d) Saksi,

e) Sedang tidak ihram atau haji, serta

f) Tidak dalam paksaan.

Dalam Islam sendiri, terdapat 2 syarat dalam suatu perkawinan, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum melakukan perkawinan adalah tidak bertentangan dengan larangan – larangan dalam ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya dalam surat Al-Maidah ayat 5, yaitu laki – laki Islam bisa menikahi perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani. Kemudian tidak bertentangan dengan surat An – Nisaa' ayat 22 , 23 dan 24.

Sedangkan syarat khususnya yakni sebagai berikut :

a. Calon pengantin,
b. Islam, akil baliq, sehat rohani dan jasmani,
c. Persetujuan bebas,
d. Wali nikah,
e. Saksi,
f. Mahar,
g. Ijab dan qobul. (Ahmad Azhar Basyir, 2004 : 31)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Tujuan Perkawinan

Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum : 21 disebutkan

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

Artinya : *Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan saying. Sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS. Ar-Rum : 21)

Keluarga yang dituju dengan adanya perkawinan adalah keluarga yang :

a. Sakinah, artinya tenang
b. Mawaddah, keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani,
c. Rahmah, keluarga yang didalamnya terdapat rasa kasih sayang yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian.

27

Tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan uraian mengenai pengertian di atas, dapat dijabarkan tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut :

i. Melaksanakan ikatan perkawinan antara laki – laki dan perempuan dewasa untuk membangun rumah tangga.
ii. Mengatur kebutuhan biologis manusia.
iii. Melahirkan keturunan guna melanjutkan kehidupan secara turun – temurun dan memelihara serta membina anak hasil perkawinan tersebut.
iv. Menegaskan mengenai hak serta kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga
v. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur tentram dan damai.

Dari ayat – ayat Al - Qur'an dan hadist nabi, tujuan dari perkawinan menurut agama Islam yaitu guna melengkapi desakan intuisi manusia, sakinahnya suatu keluarga berdasarkan dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya.

Hukum Islam mengontrol suatu perrnikahan agar dilaksanakan berdasarkan akad atau perikatan hukum antar pihak-pihak yang bersangkutan serta disaksikan 2 orang laki–laki. Dengan pernikahan maka terbentuklah hubungan lahir antara suami istri dalam membangun rumah tangga yang berlandaskan *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dengan kata lain, pernikahan bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang tentram dan penuh kasih serta sayang. (Quraish Shihab, 1993 : 253)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Prinsip – Prinsip Perkawinan

KHI atau Kompilasi Hukum Islam yang terdapat di Indonesia merupakan pengemabangan dari Undang - Undang Perkawinan. Oleh karena itu tunduk pada tujuan yang terkandung dalam UU No.1 Tahun 1974, meskipun ruang lingkupnya terbatas pada kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi tersebut harus dapat memberikan landasan hukum bagi perkawinan yang dapat dilangsungkan oleh oleh umat Islam. Misi tersebut adalah sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang telah melaksanakan berbagai peraturan mengenai perkawinan bagi berbagai golongan warga Negara di Indoensia, yakni sebagai berikut :

a. Bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama yang dijiwai oleh hukum adat.
b. Bagi penduduk asli Indonesia berlaku hukum adat.
c. *Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesia* (Stbl. 1933 No. 74) berlaku bagi penduduk asli Indonesia yang beragama Kristen.
d. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan yang menyesuaikan berlaku bagi penduduk Timur Asing Cina dan penduduk Indonesia yang keturunan Cina
e. Bagi penduduk Timur Asing lainnya serta penduduk Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku aturan dari adat mereka masing - masing.
f. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata berlaku bagi penduduk Eropa serta penduduk Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Oleh karena itu, menurut landasan dasar Pancasila dan UUD 1945 serta UU Perkawinan, selain KHI, prinsip – prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 juga harus mampu menyesuaikan dengan segala realitas kehidupan yang ada dalam masyarakat saat ini. Atas dasar itulah perkawinan yang diatur dalam KHI menentukan asas atau dasar perkawinan, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, dan merupakan harpan pengembangan dan kebutuhan zaman. Karena KHI merupakan interpretasi dari UU Perkawinan. Maka prinsip yang diajukan mengacu pada UU Perkawinan. Hukum Perkawinan memiliki 6 asassebagai berikut :

i. Tujuan pernikahan adalah untuk membangun keluarga yang bahagia dan kekal, membantu untuk mewujudkan kesejahteraan spiritual dan material dari suami dan istri.

ii. UU mengatur bahwa jika perkawinan dilakukan menurut hukum berbagai keyakinan agama, maka perkawinan itu sah. Selain setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

iii. UU Perkawinan ini menganut asas monogamy. Namun, seseorang dapat melakukan poligami, karena hukum dan agama seseorang memperbolehkan suaminya memiliki istri lebih dari 1 orang..

iv. UU Perkawinan ini memegaskan bahwa calon pasangan suami dan istri menikah atas dasar kedewasaan jasmani dan rohani, agardapat mewujudkan dengan benar tujuan perkawinan, tanpa memiliki pemikiran atas perceraian, untuk memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohaninya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

v. Untuk memiliki keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka UU ini menekankan pada prinsip dipersulitnya proses perceraian.

vi. Hak serta status isteri adalah seimbang dengan suami. Sehingga dengan demikian segla sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan oleh suami dan istri. (Nipan Abdul Halim, 2003 : 79-80)

6. Akibat Perkawinan

Perkawinan yang dilakukan oleh suami dan istri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat di bidang hukum, diantaranya adalah:

a) Timbulnya harta dan benda dalam perkawinan

Suami dan istri yang terkait dalam suatu pernikahan yang sah, akan mengahsilkan harta dan benda, baik yang didapat sebselum perkawinan ataupun setelah perkawinan. Pengaturan terhadap harta kekayaan perkawinan tersebut di atur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 35 ayat 1 disebutkan bahwa harta bersama suami dan istri hanyalah meliputi harta harta yang di peroleh suami dan istri sepanjang pernikahan, sehingga yang termasuk harta bersama adalah hasil dan pendapatan suami dan istri.

b) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak

Akibat hukum terakhir dari perkawinan yang sah adalah adanya hubungan antara orang tua dan anak. Kedua orang tua wajib memelihara serta mendidik anak – anak hasil perkawinan sebaik – baiknya sampai anak – anak menikah atau mandiri,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dimana kewajiban itu berlangsung terus walaupun perkawinan anak putus akibat perceraian. Pengaturan selanjutnya mengenai hal ini di atur dalam Pasal 45 sampai Pasal 49 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974.

7. Hikmah Pernikahan

Dengan pernikahan akan menghasilkan banyak keturunan. Saat keturunan yang dihasilkan banyak, maka proses mesejahterakan bumi berlangsung lebih mudah, karena sesuatu yang harus dilakukan bersama maka akan sulit bila dilakukan sendirian. Oleh karena itu, keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus dijaga sampai benar - benar sejahtera.

Keadaan hidup manusia tidak akan sejahtera kecuali jika keadaan rumah tangganya teratur. Ketertiban tersebut tidak mungkin terjadi kecuali harus ada perempuan yang mengelola suatu keluarga. Karena itulah saat nikah disyariatkan, keadaan pria menjadi tentram dan dunia semakin makmur. Pria dan wanita adalah dua sekutu yang berfungsi mensejahterakan dunia dengan berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan masing - masing. Sesuai dengan sifatnya, manusia itu cenderung mengasihi. Adanya istri yang bisa menghilangkan kesedihan dan ketakutan, istri berfungsi dalam suka duka, penolong, dan mengelola kehidupan. (Ali Ahmad Al – Jurjawi : 281)

Manusia diciptakan dengan mempunyai rasa *ghibrah* (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya. Serta dengan dilaksanakannya perkawinan,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maka secara tidak langsung hal ini membuat suami maupun istri akan menjaga pandangan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Jika keutamaaan tersebut dilanggar, maka aka nada dua bahaya, yaitu melakukan perbuatan tercela dan kebencian diantara pelakunya, zina serta kemungkaran. Adanya perilaku semacam ini niscaya akan mengganggu tatanan alam

Perkawinan akan memelihara keturunan dan akan melindungi mereka. Di antara hal tersebut terdapat banyak manfaat perkawinan , antara lain perlindungan ahli waris, mendapatkan keturunan, karena seorang suami tidak mungkin memiliki anak dari darah dagingnya apabila tidsak memiliki istri, tidak pula mengetahui garis pemisah serta cabangnya antar sesama manusia. perihal seperti ini tidak diperbolehkan oleh agama dan manusia. secara umum, pernikahan akan menghasilkan banyak keturunan.

Ketika seseorang meninggal, semua amal perbuatan akan terputus, yang memberinya rahmat dan pahala. Tetapi jika masih memilki anak serta istri, mereka tentu akan menjadi lading pahalakarena do'a – do'anya dengan setulus hati hingga amalan tidak terhenti dan menjadi hal jariyah. Amalan anak yang shaleh adalah amalan yang tetap mutlak, meski prang tua sudah meninggal.

Islam menganjurkan dan menggalakkan kawin sebagaimana tersebut karena berdampak baik pelakunya, masyarakat dan seluruh umat manusia. Suatu perkawinan yang mana memebuhi syarat – syarat yang telah ditentukan dapat dikatakan sah, baik secara agama maupun Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Perkawinan Siri

1. Pengertian Perkawinan Siri

Sudah tidak asing dikalangan masyarakat Indonesia dengan kata *sirri* ini. Menurut tata bahasa Indonesia, kata *sirri* berasal dari bahasa Arab, yakni rahasia atau tersembunyi. Dengan demikian pernikahan siri adalah pernikahan yang rahasia atau tersembunyi. Yang mana hanya pihak – pihak tertentu saja yang mengetahui dan tidak diumumkan kepada khlayak ramai, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Keadaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam untuk melaksanakan walimah dalama pernikahan ataupun memotong seekor kambing (Majdi bin Manshur, 2019:225)

Istilah nikah siri atau nikah dibawah tangan mmang sudah berlangsung sejak zaman para nabi. Namun nikah siri yang dilakukan pada masa dulu berbeda pelaksanaannya dengan nikah siri pada dewasa ini. Dulu perkawinan siri yang dimaksud merupakan perkawinan yang yang sesuai dengan syari'at Islam, yakni calon mempelai (pria dan wanita), ijab dan qabul yang dilafadzkan wali dan mempelai pria, disaksikan oleh 2 orang. Saksi disini diminta tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut ke khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimatul 'ursy*.

Sedangkan perkawinan siri yang terjadi di Indonesia adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ataupun wakil wali serta disaksikan oleh para saksi, namun tidak dilaksanakan dihadapan Petugas Pencatatan Nikah sebagai aparat Negara. Ataupun perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil, bagi masyarakat non-muslim.

Meski demikian, tidak dicatatkannya perkawinan siri tersebut tidak mengganggu keabsahan pernikahannya berdasarkan hukum Islam, karena hanya permasalahan administrative. Tapi bila perkawinan tidak dicatatakna kepada lembaga yang berwenang, maka suami maupun istri tidak memiliki bukti autentik mereka telah melakukan perkawinan yang sah. Akibatnya, berdasarkan aspek yuridis, perkawinan itu tidak diakui oleh pemerintah, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum.

Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatatkan dan saat melangsungkanperkawinan tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Ma'ruf Amin, forum ijtima' Ulama Komisi fatwa sengaja memakai istilah perkawinan di bawah tangan, istilah ini sesuai dengan ketentuan agama Islam. Perkawinan di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh atau hukum Islam. Namun, perkawinan ini tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan di bawah tangan, yang tidak dicatatkan dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap isteri dan anak yang dilahirkan terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Terkait dengan masalah haram jika ada kemadharatan, Ma'ruf Amin menegaskan bahwa hukum perkawinan yang awalnya sah memenuhi sryarat dan rukunnya, menjadi haram karena ada yang menjadi korban. Dengan demikian haramnya itu datangnya belakangan, perkawinannya sendiri tidak batal, tapi menjadi berdosa karena ada orang yang terlantarkan, sehingga dia berdosa karena mengorbakan isteri atau anaknya. Sah tapi haramkalau sampai terjadi korban.

Dengan demikian, perkawinan siri ini akan menghasilkan kerugian serta dampak negative bagi keberlangsungan rumah tangga. Akibat hukumnya perkawinan siri tidak memiliki akta nikah atau surta nikah. Secara yuridis suami maupun istri dan anak yang dihasilkan dari perkawinan itu tidak bisa melaksanakan tindakan hukum keperdataan yang berhubungan dengan keluarganya.

2. Dasar Hukum Nikah Siri

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam tidak mendefinisikan mengenai permasalahan perkawinan siri. Kedua peraturan tersebut hanya mengenal prosedur bahwa perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Terhadap perkawinan yang pelaksanaannya diselenggarakan diluar mekanisme yang telah diatur, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara.

Tidak ada perkawinan tidak tercatat (nikah siri) dalam hukum positif Indonesia dan termasuk dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, istilah ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hanya muncul dalam khazanah Islam dan digunakan untuk perkawinan yang dilakukan secara sembunyi – sembunyi. Perkawinan siri ini atau dikenal juga dengan perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi norma – norma agama yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan seseuai dengam ketentuan yang berlaku berdasarkan ajaran agama masing – masing, tapi tidak memenuhi syarat hukum, yakni pencatatan perkawinan tersebut pada pegawai pencatatan nikah sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Undang – Undang Perkawinan tidak secara khusus menyebutkan perkawinan siri, tetapi pada kenyataannya perkawinan semacam itu dapat dikatakan melanggar kewajiban seseorang untuk mendaftarkan perkawinannya secara resmi pada lembaga yang berwenang. Persoalan utama nikah siri ini adalah mengenai pencatatan nikah, bukanlah terkait dalam kelengkapan rukun dan syari'at nikah yang memenuhi syari'at Islam yang pada dasarnya sudah mutlak.

Menurut Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 dan agama, perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah jika memenuhi serta syarat rukum pernikahan. Namun jika merujuk Pasal 2 ayat (2) yang mana wajib dilihat sebagai suatu kesatuan, yang mana memiliki maksud yakni perkawinan adalah sah bila berdasarkan agama dan kepercayaan dan harus dicatatkan sesuai dengan Pasal 100 KUHPerdata serta akta perkawinan merupakan suatu bentuk nyata (bukti) terjadinya stuatu pernikahan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Secara khusus ketetapan PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan, dimana pada Pasal 10 ayat (2) mengatur bahwa tata cara pernikahan harus dilakukan menurut hukum serta agama masing – masing orang. Pada ayat 3 mengatur bahwa berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, maka harus ditaati mengenai tata cara perkawinan tersebut, yakni perkawinan diselenggarakan di depan Pegawai Pencatat Nikah serta harus hadir 2 orang saksi. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah – istilah seperti perkawinan siri dan sejenisnya, juga tidak mengaturnya dalam suatu peraturan khusus.

3. Macam – Macam Nikah Siri

   a. Pernikahan tanpa wali

      Perkawinan seperti ini dilakukan secara sembunyi – sembunyi, sebab wali dari pihak perempuan tidak setuju atau karena menganggap tidak absahnya perkawinan ini tanpa adanya wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu tanpa melaksanakan ketentuan – ketentuan syari'at. Perkawinan seperti ini jelas merupakan perkawinan yang tidak sah. Sebab wali merupakan rukun sahnya pernikahann.

   b. Pernikahan tanpa saksi atau saksi kurang kuat

      Pernikahan seperti ini dilakukan dengan beberapa alasan seperti malu, takut atau disengaja tidak ada saksi atau mengambilsaksi satu orang saja. Bisa juga dengan menggunakan alasan karena ingin memuaskan hawa nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan –

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ketentuan syari'at.

c. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai syari'at, tapi tidak dicatat ke lembaga yang berwenang.

Menurut agama hukumnya sah akan tetapi dari hukum formal atau UU bahwa perkawinan ini adalah tidak sah. Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatn sipil adalah agar seseorang memilki alat bukti untuk membuktikan bahwa dirinya sungguh telah melakukan perkawinan dengan pasangannya. Perkawinan seperti ini juga dilakukan secara siri dengan beberapa alasan seperti faktor biaya, seperti tidak mampu membayar administrasi pencatatan pernikahan, atau takut melanggar peraturan yang melarang nikah lebih dari satu orang, atau menyembunyikan perkawinannya dari keluarga atau lain sebagainya.

Sedangkan hal yang sering terjadi di Indonesia diantaranya perkawinan tidak dicatatkan. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang – orang Islam di Indonesia, memenuhi rukun – rukun maupun syarat – syarat perkawinan, tetapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sebagaimana yang diaturdalam UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Mohd. Idris Ramulyo : 154).

Perkawinan siri merupakan perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan tetapi belum atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil (Neng Djubaidah : 76).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Faktor Terjadinya Nikah Siri

Terjadinya perkawinan siri di masyarakat merupakan sebuah fenomena atau realitas sosial dan tentu ada alasan – alasan atau faktor – faktor dari para pelakunya. Di antara faktor – faktor tersebut, menurut Ali Imran dalam bukunya yakni Hukum Perkawinan Islam di Indonesia adalah :

1. Nikah siri dilakukan karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihanmereka.
2. Nikah siri dilakukan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasisawa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mapu mengahalalkan gejolak cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran tejadinya zina.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasa dilakukan oleh para mahasiswa, disamping khawatir karena terjadi zina , mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih disembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman - teman dikampus.
6. Nikah siri sering ditempatkan sebagai sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri. Seperti kasus *public figure* berikut : a) Pernikahan yang pernah terjadi antara Rhoma Irama dengan Angel Lelga yang menurut beberapa sumber media, Rhoma menikahi Angel karena dia bersedia menjadi Muallaf. Pernikahan tersebut ditutupi salah satunya karena khawatir popularitas keartisannya akan pudar. Nyatanya, setelah terekspos media masa, Rhoma Irama justru menceraikan Angel Lelga.

   b) Pernikahan Bambang Triatmojo dan Mayangsari. Sebagai orang terkenal di Indonesia, pernikahan siri dalam poligami yang dilakukan Bambang salah satunya bertujuan mengindari publikasi media. Ketika pers mengulas berita tersebut, yang terjadi adalah konflik berkepanjangan dengan istri pertamanya, Halimah bahka dengan anak-anaknya. Disinilah sebenarnya keabsahan nikah siri haru dipertanyakan kembali.
7. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan tidak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mau tahu prosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah desa terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk urusan pernikahan. Asal sudah dnikahkan oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara Islam dan tidak perlu dicatatkan.

8. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada perngahrgaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.

9. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit - belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Disamping alasan biaya, alasan tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi yang sudah di syaratkan UU Perkawinan atau Peraturan Perundang – Undangan di bawahnya juga menjadi kendalanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

10. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi muallaf (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahannya.
11. Dan masih banyak faktor-faktor lain, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi perkawinan siri dipandang sebagai jalan yang lebih mudah untuk menghalalkan hubungan suami istri.
12. Calon suami dan isti yang hedak melakukan perkawinan siri terbentur dengan persyaratan administrasi atau aturan kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil (PNS), POLRI, TNI, Pegawai Swasta tertentu atau pensiunan. Para pelaku (janda atau duda pensiunan) sengaja menyembunyikan perkawinannya agar merkea tidak dikeluarkan dari perusahaan tempat mereka bekerja dan lain sebagainya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-quran atau hadits tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah)* yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemashlahatan, hukum Islam di Indonesia mengaturnya.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam msyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang - undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (Mitsaqon Gholidzon) perkawinan dan lebih khusus lagiperempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melaui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak - hak masing - masing.

Salah satu kerangka awal untuk mendapatkan jaminan hukum dalam sebuah perkawinan adalah dengan mencatatkannya kepada instansi yang berwenang. Hal ini tidak hanya berlaki bagi orang yang beragama Islam saja, melainkan juga bagi mereka yang beragama Kristen, Katholik, Hindu maupun Budha.Sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Penjelasan Pasal 1) juga dalam UU

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2, yang diperkuat dengan Inpres RI No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan 6.

Melihat kriteria rukun maupun persyaratan nikah seperti yang telah dijelaskan di atas, tidak ada penyebutan tentang pencatatan dalam perkawinan. Keberadaan saksi sianggap telah memperkuatkeabsahan suatu perkawinan. Pihak - pihak terkait tidak bisa mengadakan pengingkaran akan akad yang sudah terjadi. Biasa jadi ini didasarkan pada pernikahann masa Rasulullah sendiri tidak ada yang dicatatkan. Dalam kitab fikih klasikpun tidak ada pembahasan tentang pencatatan pernikahan.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala resioknya masih dijadikan sebagai alternatif. Dikalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana sehingga dengan rosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan karena khawatir melakukan dosa dan tesjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.

Mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum tidak sama mungkin karena tidak tahu atau karena hal lain, sehingga ketentuan - ketentuan tersebut diatas belum dapat berjalan dengan baik, peraturan perundang - undangan memberi alternatif kelonggaran kepada pihak-pihak karena sesuatu hal yang harus segera melangsungkan perkawinan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perkawinan Siri di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa dalam perkawinan merupakan suatu pernikahan dengan akad yang sangat kuat *mitssaqan ghalidzan*, dan mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan bentuk sutau ibadah. Jika pernikahan bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Perkawinan yang sah menurut KHI ialah jika dilaksanakan berdasarkan hukum syari'at berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak ada penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri mengenai perkawinan siri, meski demikian dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 telah diperjelas bahwa suatu pernikahan wajib dicatat dalam buku catatan perkawinan atau akta nikah. Dimana dengan dokumen tersebutlah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah sutau perkawinan dapat dibuktikan secara sah berdasarkan Negara.

1. Faktor Perkawinan Siri di kecamatan Marpoyan Damai

Fenomena perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai kebanyakan terjadi karena berbagai macam alasan, seperti faktor ekonomi, belum cukup umur saat menikah, merupakan istri yang tidak sah (suami berpoligami) dan kurangnya informasi mengenai perkawinan siri, terutama bagi masyarakat yang telah berumur dan atau *gaptek*. Meskipun zaman sekarang merupakan zaman elektronik, namun beberapa orang masih tidak memiliki android atau semacamnya yang dapat digunakan untuk mengakses internet. Dan meskipun telah memiliki android, namun kebanyakan orang tua tidak dapat mengoperasikan dengan baik dan benar. Sehingga membuat kurangnya informasi mengeani perkawinan masa kini, yang membuat pikiran mereka membenarkan praktik perkawinan siri.

Selain itu adanya pemuka masyarakat yang beranggapan dan berpendapat bahwa perkawinan siri tersebut merupakan perkawinan yang sah saja, asalkan syarat serta rukunnya terpenuhi, serta beranggapan bahwa Islam itu merupakan agama yang memudahkan umatnya untuk kemaslahatan masyarakat.

Sebagian besar menurut presepsi mereka (pasangan nikah siri) yaitu nikah mempunyai pengertian bahwa secara legal formal (fiqh) Islam dinyatakan sah. Berkaitan dengan pencatatan di KUA dan adanya resepsi (walimatul ‘ursy) secara substansinya keduanya lebih didasarkan untuk kemaslahatan.

Menurut penghulu KUA Kecamatan Marpoyan Damai, Bapak H. Hasmir mengatakan bahwa perkawinan siri di KUA Marpoyan Damai sendiri tidak pernah ada dilaksanakan, namun banyak masyarakat yang datang guna melakukan konsultasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengenai masalah perkawinannya, termasuk masyarakat yang melakukan perkawinan siri.

Masyarakat sendiri yang melakukan perkawinan siri datang ke KUA dan ingin membuat buku nikah hanya dengan menggunakan kertas selembar berisi surat yang menyatakan mereka sudah menikah secara siri, namun ada juga yang tidak dan bahkan ada yang membawa buku nikah "palsu". Dari banyak kasus yang bapak Hasmir temui, yang paling banyak terjadi adalah dimana pasangan sudah melakukan perkawinan siri dan memliki buku nikah "palsu" ini. Tentu pihak KUA segera menarik buku nikah palsu supaya tidak terjadi *double*nya bukunikah pasangan, meski buku nikah palsu dan asli tentu memiliki perbedaan mencolok.

Selanjutnya bapak Hasmir menjelaskan bahwa banyak faktor masyarakat memilih melakukan perkawinan siri, terutama di kecamatan Marpoyan Damai. Banyak diantaranya adalah:

a) Mempelai wanita sudah hamil duluan sebelum adanya perkawinan. Karena takut aib akan tersebar luas, maka dilaksanakan perkawinan siri terlebih dahulu.meski demikian, masyarakat setempat tetap mengetahui dan menimbulkan cemooh bagi keluarga tersebut.
b) Masa pandemi beberapa tahun ini juga memaksa masyarakat melakukan perkawinan siri terlebih dahulu. Dikarenakan banyaknya pegawai pemerintahan termasuk KUA *work from home* saat masa covid-19 muncul, membuat masyarakat sulit mendaftarakan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama bagi masyarakat beragama

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Islam dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non-muslim.

c) Selanjutnya adalah karena perkawinan terjadi saat umur dari mempelai pria dan atau wanita tidak legal untuk melakukan perkawinan. Awalnya batas umur melakukan perkawinan di Indonesia adalah 16 tahun berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974. Namun hal tersebut diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang – undang No. 1 Tahun 1974, masyarakat yang melakukan perkawinan dimana mempelai wanitnya di bawah 19 tahun, maka dianggap perkawinan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, bahkan dapat dijerat hukum pidana.

d) Faktor lainnya terjadi perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai adalah mempelai wanita yang menikah bukanlah istri pertama. dimana sang mempelai laki – laki melakukan poligami tanpa seizing maupun dengan izin istri sah, tetap membuat istri kedua dan atau seterusnya merupakan istri yang tidak diakui oleh Negara.

Untuk perkawinan siri sendiri, menurut bapak Hasmir, di hukum positif di Indonesia tidak ada dikenal istilah siri, yang ada hanya perkawinan tercatat dan tidak tercatat. Dimana perkawinan tidak tercatat hukumnya adalah tidak sah. Namun secara hukum Islam, hukumnya bisa sah ataupun tidak sah. Sah bila rukun dan syaratnya terpenuhi, dan tidak sah jika rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, seperti yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menjadi wali nikah bukanlah ayah atau nasab dari sang mempelai wanita atau pihak - pihak yang diberi wewenang untuk menikahkan.

Setalah peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Marpoyan Damai, pelaksanaan perkawinan siri masih ada terjadi, namun untuk meringkas hasil penelitian ini, saya akan meringkas dengan mengambil 5 sample pelaksanaan perkawinan siri dari 6 kelurahan yang ada. Berdasarkan usia, para pasangan yang melakukan perkawinan siri ini rata – rata berusia akhir 20 tahunan sampai umur 40 tahunan. Berikut data wawancara kepada masyarakat yang melakukan perkawinan siri :

No.	Nama Pasangan	Tanggal Wawancara	Faktor	Akibat
1	Sri dan Juna	16/10/2021	Belum memasuki usia legal untuk menikah	Sulit membuat data kependudukan
2	Mr. S dan Mr. R	20/10/2021	Hamil di luar nikah	Sulitnya membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga
3	Nesa dan Ajay	17/10/2021	Poligami	Sulitnya membuat akta kelahiran anak dan katu keluarga
4	Vio dan Pangihutan	2/10/2021	Beda agama dan pihak keluarga tidak setuju pindah agama	Sulitnya membuat data kependudukan
5	Asih dan Wan	16/10/2021	Akta Cerai tidak keluar	Sulitnya membuat akta kelahiran anak dan kartu keluarga

Berdasarkan Tabel di atas, hasil wawancara mengenai faktor dan akibat dengan pihak yang terkait melakukan nikah siri dapat dijelaskan sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a) Sri (16 tahun) dan Juna (24 tahun)

Sri merupakan warga kecamatan Marpoyan Damai, sedangkan Juna merupakan warga kecamatan Bukit Raya. Siska saat ini masih berstatus sebagai siswi petama dari sekolah menengah atas (SMA) sedangkan Juna merupakan perkerja bangunan. Alasan mereka melakukan perkawinan siri adalah saat melakukan perkwinan, Sri saat itu masih tamat SMP dan usianya masih 15 tahun lebih. Mereka menikah saat korona masih tersebar luas dan belum ada vaksin, dan saat itu Sri juga belajar daring dan tidak ada kegiatan lainnya. Sehingga mereka memutuskan untuk menikah siri terlebih dahulu sembari menunggu Sri berusia legal untuk menikah secara Negara.

Setelah melakukan perkawinan mereka tentunya harus membuat kartu keluarga dan memperbaharui KTP untuk Juna. Dari sinilah keluarga Juna kesulitan untuk mengurusnya di kantor pemerintahan karena mereka meminta bukti bahwa Juna dan Sri telah melakukan perkawinan, yaitu buku nikah. Maka dari itu Sri dan Juna untuk saat ini masih dalam proses pengurusan buku nikah mereka dan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya selain itu, mereka juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat, terlebih sang istri. Dimana istri sulit untuk mendekati ibu – ibu yang lain dan masyarakat mengucilkannya karena ia masih kecil dan menikah di bawah umur. Sehingga sering ia dengar perkataan “masih kecil kok sudah menikah” sampai fitnah yang menyatakan bahwa Sri sudah hamil duluan dan sebagainya. (Juna, wawancara, Oktober 16, 2021)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b) Mrs. S (20 tahun) dan Mr. R (25 tahun).

Untuk pasangan yang melakukan perkawinan siri ini mereka meminta untuk tidak mengekspos identitasnya. Mereka melakukan perkawinan siri dikarenakan Mrs.S sudah hamil sebelum melakukan menikah. Untuk menutupi ini, orang tua dari Mrs.S meminta Mr.R untuk melakukan perkawinan siri secepatnya. Saat Mrs.S melakukan perkawinan siri, usia kandungan sudah masuk usia tua. Sehingga saat melahirkan dan proses pembuatan akta nikah, hanya tertulis anak dari sang istri. Sehingga sulit untuk mengubahnya karena mereka belum mendaftarkan perkawinannya. Selain itu pasangan ini juga mendapat sanksi sosial dari masyarakat, banyak cibiran dan hinaan yang di terima, khususnya Mrs.S hingga membuat Mrs.S sempat mengalami *Baby Blues* untuk sementara waktu. (Mrs.S, wawancara, Oktober 20, 2021)

c) Nesa (28 tahun) dan Ajay (43 tahun)

Nesa merupakan karyawan di salah satu perusahaan swasta di Pekanbaru. Sedangkan Ajay merupakan merupakan karyawan di salah satu Bank Swasta di Pekanbaru. Perusahaan Nesa dan Ajay merupakan relasi, sehingga Nesa dan Ajay saling mengenal dan jatuh cinta. Nesa dari awal sudah mengetahui bahwa Ajay memiliki istri sah. Namun kesalahanya, mereka tetap melanjutkan cinta terlarangnya semakin larut. Sehingga Nesa meminta Ajay untuk menikahinya secara siri. Hingga saat ini istri dari Ajay belum mengetahui suaminya memiliki istri lain selain dirinya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selepas perkawinan siri ini, Nesa maupun Ajay paham betul dampak yang mereka miliki dari perkawinan siri ini, mereka tidak bisa membuat kartu keluarga dan dalam Akta Kelahiran anak, hanya nama Nesa yang tercantum. Meskipun demikian Ajay berjanji untuk bertanggung jawab penuh kepada Nesa serta anak hasil perkawinan siri mereka. Meskipun demikian, sanksi sosial terus menghantui. Terutama untuk sang buah hati yang sedang dalam umur yang sedang aktif - aktifnya. Sehingga anak kesulitan mendapat teman di lingkungan perumahannya. (Nesa, wawancara, Oktober 17, 2021)

d) Vio (25 tahun) dan Pangihutan (31 tahun)

Vio adalah seorang muslim dan berdomisili di Kecamatan Marpoyan Damai. Sedangkan Pangihutan beragama Khatolik dan bekerja di luar Pulau Sumatra. Karena perbedaaan agama dan masing – masing orang tua tidak melepaskan anaknya untuk pindah agama, membuat pasangan ini dilema perkawinan mengahntui keduanya karena permasalahan agama yang berbeda. Namun karena tekad untuk menikah, akhirnya Pangihutan bersedia menikah secara siri dengan vina tanpa dihadiri orang tua Pangihutan.

Dari perkawinan siri ini, vio dan pangihutan sulit untuk membuat data kependudukan serta Katu Keluarga (KK), serta psikologis akibat menyembunyikan perkawinan siri dari orang tua Pangihutan mengikuti. (Vio, wawancara, Oktober 2, 2021)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e) Asih (27 tahun) dan Wan (26 tahun)

Sama dengan kasus pasangan Mrs.S dan Mr.R, Asih dan Wan melakukan perkawinan siri karena Akta Cerai Asih dengan suami terdahulu tidak ada. Asih yang ditinggal pergi oleh suami, yang mana talak hanya di ucapkan dalam pesan *Whatsapp*. Karena tidak tau dimana keberadaan mantan suami sekarang, Akta Cerai Asih dan mantan suami tidak bisa keluar. Terpaksa Asih melaksanakan perkawinan siri dengan Wan setelah masa *Iddah* selesai. Kini Asih dan Wan memiliki anak hasil dari perkawinannya. (Wan, wawancara, Oktober 16, 2021)

Akibat dari perkawinan siri ini, Asih dan Wan sulit untuk membuat Akta Kelahiran anaknya karena tidak adanya bukti mereka mencatatakan perkawinannya ke KUA. Serta sulit membuat Kartu Keluarga (KK). Disamping itu, anak di cap sebagai anak "haram" oleh masyarakat setempat akibat tidak sahnya perkawinan yang di laksanakan mereka menurut Negara. Sehingga anak cenderung *introvert* dan tidak percaya diri serta sering mempertanyakan dirinya kepada orang tua.

2. Pandangan Ulama Mengenai Perkawina Siri

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat, saya selaku penulis juga melakukan riset terhadap pendapat para ulama serta melakukan wawancara dengan salah satu imam serta ustadz masjid Iqra' di lingkungan perumahan pemprov yang juga "membantu" masyarakat melakukan perkawinan siri ini, berikut hasilnya :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Komisi Tetap Riset Ilmiyah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia

Bila akad ijab qobul serta syarat nikah terpenuhi serta tidak ada penghalang yang membatalkan akad tersebut, maka perkawinan ini sah. Namun bila terdapat peraturan bahwa pencatatan akad nikah membawa masalahat bagi kedua mempelai baik untuk masa sekarang ataupun masa depan, maka pencatatan nikah seperti ini wajib dipatuhi. (Fatwa Al Lajnah Ad Daimah lil Buhuts Al 'Ilmiyyah wal Ifta' No.7910)

ii. Syaikh Al-Albani

Menikah tanpa wali dan saksi tidak sah hukumnya dikarenakan tidka terpenuhinya rukun dan syarat nikah itu sendiri. Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan penguasa keberadaan wali bagi siapa (wanita) yang tidak memiliki wali. (H.R. At-Tarmidzi no. 1102 dalam Shahihul Jaami'VI/203 dan al-Irwaa' VI/238). Dan tidaklah sah pernikahan kecuali dengan adanya keberadaan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. 'Abdurrazzaq VII/215 dalam Al-Irwaa' No. 1858)

iii. Syaikhul Islam Ibnu Tamiyyah

Apabila nikah 'Urfi telah sempurna ijab dan qabulnya, disaksikan oleh dua orang saksi dan telah diumumkan, maka ini adalah pernikahan yang syar'I dan sah. Meskipun tidak dicatat di kantor resmi (KUA). (Majmu' Fatwaa 8/220)

iv. Ustadz Raehanul Bahraen

Hukum pernikah siri ada 2, sah dan tidak sah. Sah bila sempurna syarat dan rukunnya, namun berdosa karena tidak patuh akan aturan dari pemerintah. Dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tidak sah jika tidak memenuhi rukunnya, seperti bukan wali sah yang menikahkan sang mempelai wanita dengan mempelai pria (Bahraen, Raehanul. 2018. "Apa Itu Nikah Siri?", https://muslim.or.id/32619-apa-itu-nikah-sirri.html, diakses pada 21 Juni 2018)

v. Ustadz Ammi Nur Baits

Menurut ustadz Ammi Nur Baits, perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah selagi syarat dan rukunnya terpenuhi, namun perkawinan ini merupakan perkawinan yang sangat tidak di anjurkan. Kita sebagai muslimin diperintahkan Allah untuk menta'ati pemerintah selama aturan tidak bertentangan dengan syari'at Islam, pencatatan perkawinan sama sekali tidak bertentangan dengan aturan Islam. Selain itu, pencatatan perkawinan adalah mengikat kuat kedua belah pihak serta memberi jaminan perlindungan kepada wanita dan anak. (Nur Baits, Ammi. 2019. "Hukum Nikah Siri?", konsultasisyariah.com/11347-nikah-siri-tanpa-sepengetahuan-orang-tua.html#, diakses pada 4 April 2019)

vi. Ustadz Jon

Menurut Ustadz Jon melakuakn perkawinan siri itu sah-sah saja. Namun harus diperhatikan bagaimana rukun dan syarat dalam menikah. Isalm tidak pernah mempersulit kaum muslimin dalam menjalankan hukum – hukum Islam, terlebih dalam perkawinan. (Jon, wawancara, September 21, 2021)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Konsekuensi Perkawinan Siri Terhadap Istri dan Anak

Permasalahan yang terjadi tentang perkawinan siri yang terjadi adalah sikap masyarakat itu sendiri yang tidak peduli pada pentingnya percantatan perkawinan yang mana jika tidak dilakukan akan mengakibatkan lemahnya perkawinan tersebut dimata hukum yang berdampak pada anak, istri, suami serta harta benda dalam perkawinan tersebut. Padahal adanya pencatatan perkawinan ini berfungsi untuk mewujudkan keluarga yang damai serta bahagia seminimalnya dapat menghindari fitnah terhadap suatu keluarga. Maka dari pada itu, layaknya pasangan yang ingin melakukan perkawinan harus berfikir secara matang untuk perkawinan yang akan dilangsungkan.

Menurut penulis, permasalahan yang akan timbul setelah berlangsungnya perkawinan siri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

> Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Perkawinan siri selalu merugikan hak serta kewajiban suami serta istri dan menyeret terhadap munculnya hubungan buruk antara suami dan isteri serta meyeret terhadap munculnya kehancuran social dalam suatu zaman, dimana manusia berwatak jujur serta ikhlas semakin sulit ditemui. Selain itu, perkaiwnan siri juga tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ayat (2) KHI.

Sebagaimana yang penulis utarakan sebelumnya, perkawinan siri akan menimbulkan konsekuensi negative bagi para pelaku perkawinan, disini akan penulis coba uraikan lebih rinci, dimana di antaranya adalah mengenai kedudukan istri, anak dan harta benda.

1. Kedudukan Istri

Karena perkawnan siri merupakan perkawinan yang tidak di akui oleh Negara, maka Negara tidak melindungi perkawinan siri ini karena tidak adanya data autentik mereka bahwa sudah melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 6 intstruksi presiden nomor 1 tahun 1991 mengenai KHI menegaskan bahwasanya tidak adanya keabsahan hukum terhadap suatu pernikahan siri. Bahkan pernikahan ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, yangmana tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Dengan demikian, pernikahan siri memiliki dampak yang sangat buruk untuk isteri, sehingga tidak berhak terhadap nafkah dari suami, sebagaimana mestinya yang diatur pada Pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwasanya suami berkewajiban melindungi isterinya serta memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga yang mana sesuai dengan penghasilannya suami menanggung hal – hal berikut, yakni sesuai nafkah,kiswah dan tempat tinggal sang isteri, biaya berumah tangga, biaya merawat dan pengobatan untuk isteri dan anak serta biaya pendidkan bagi sang anak. Dengandemikian, jika tidak dapat memenuhi hak – hak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

isteri, maka dikhawatirnkan istri tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan baik.

Istri dalam perkawinan siri bukanlah merupakan istri sah di mata Negara. Karena perempuan tidak memiliki bukti fisik berupa surat nikah, maka akibatnya bila suami tidak mau bertanggung jawab atasnya, denagn mudah suami tidak mengakui istri tersesebut sebagai istri sahnya, meskipun perkawinan dilakukan sah menurut agama dan kepercayaan.

Hal lain bila melakukan perkawinan siri, mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memberikan kepastian hukum, sehingga rentan dalam banyak permasalahan kekerasan yang dilakukan dalam berumah tangga, disebabkan suami yang tidak dapat melakukan kewajiban – kewajibannya sebagai suami maupun ayah bagi anak yang lahir dalam suatu perkawinan tersebut, maka ia akan bertindak sewenang – wenang dan menyakiti perasaan istri.

Atas harta bersama atau yang diskenal dengan harta gono gini isteri juga tidak memiliki hak saat mereka bercerai. Sebagaimana dalam KHI disebutkan pengertian dari harta kekayaan dalam perkawinan ialah harta yang diperoleh baik sendiri – sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, yang selanjutnya disebut dengan harta bersama, tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun. Perkawinan sebagaimana yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut Negara, Sebagaimana perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak diakui Negara, sehingga dalam perkawinan siri ini tidak dikenal pula adanya harta bersama atau gono – gini ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Selain itu menjadi masalah jika laki – laki yang menikahinya secara siri secara mendadak kabur dan istri tidak mengetahui keberadaan sang suami. Maka jika wanita ingin menikah kembali menjadi sulit karena tidak adanya akta cerai bahkan talak yang menggantung. Dan istri pasti akan mendapatkan sanksi sosial, stigma negative dari masyarakat dan fitnah – fitnah yang belum tentu hal itu dijamin kebenarannya. Dikarenakan masyarakat menduga dilakukannya perkawinan siri merupakan upaya yang di tempuh untuk menutupi aib dari pasangan tersebut. Dan seringkali sang istri menjadi sasaran dari fitnah tersebut.

Psikologis istri akan *down* sehingga tidak adanya rasa percaya diri maupun hubungan sosial dengan tetangga, jika seperti itu istri akan kesulitan mendapat informasi dari lingkungan sekitar, seperti posyandu, vaksin, dan informasi- informasi lainnya tentang lingkungan setempatnya. Yang pasti hal ini akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan keluarga itu sendiri.

2. Kedudukan Anak

Anak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga, dikarenakan visi dan misi perkawinan bukan hanya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera, namun untuk mempersatukan keluarga dan membesarkan keturunan atau anak yang dilahirkan dalam suatu kehidupan berumah tangga. Dasarnya orangtua memiliki harapan anaknya dapat mewujudkan harapan serta cita-cita orangtua yang belum terlaksana, dan anak dapat mewarisi harta yang ditinggalkan orang tuanya saat telah wafat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Anak yang terlahir dalam hasil pernikahan siri sebenarnya tidak ada diatur di perundang - undangan Indoneisa, dalam KUHPerdata menjelaskan ada dua jenis kedudukan anak, yakni anak sah dan anak di luar kawin. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan kata lain anak yang terlahir di luar perkawinan sah, yangmana dalam persoalan kali ini adalah pernikahan siri dianggap sebagai anak di luar kawin.

Dampak perkawinan siri sendiri untuk anak tentunya ia bukan anak dari ayah kandungnya di mata Negara. Dengan kata lain, anak itu akan kehilangan hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam akta kelahiran hanya akan ada nama ibu selaku orang tua dari anak tersebut. Dengan hal ini, tentunya ia tidak berhak atas hak – hak perdata yang melekat pada dirinya dari ayah kandungnya maupun keluarga sang ayah. Seperti warisan, wali nikah (bagi anak perempuan), data diri dalam bersekolah, tidak berhak atas nafkah dari sang ayah.

Terlebih jika anak telah masuk dalam dunia pendidikan, saat hendak melakukan pendaftaran, tiap sekolah baik swasta maupun negeri akan memebrikan syarat pendaftaran salah satu diantaranya ialah akta kelahiran anak. Syarat pembuatan akta kelahiran anak ialah adanya akta nikah, dimana orang yang memilkinya adalah yang mendaftarkan perkawinannya pada saat akad dilangsungkan, dalam arti tidak melaksanakan perkawinan siri. Bila tidak memiliki buku kawin, maka akta nikah tidak dapat dikeluarkan karena bukti otentik yang dapat menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak sah dari perkawinan yang telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dilangsungkan yang akan membuat anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran.

Dengan kata lain, hak keperdataan yang hilang dari anak adalah :

a) Hubungan Nasab

Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.

b) Hubungan Mahram

Meskipun ia adalah ayah kandungnya dari kaca mata Hukum Islam, namun karena Negara tidak mengakui perkawinan orang tuanya, maka di mata Negara anak tersebut bukanlah anak kandung dari sang ayah. Dimana dengan kata lain, anak tersebut bukan mahram dari ayahnya maupun keluarga ayahnya.

c) Hubungan Hak dan Kewajiban

d) Hubungan pewarisan (saling mewarisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup;

Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebabkewarisan.

e) Hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak diluar nikah. Apabila anak diluar nikah itu kebetulan seorangperempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya (Syarifuddin, 2002: 195).

Selain hak keperdataan ayah kepada anak terhadapnya hilang, anak juga memliki hak - hak lainnya yakni hak Hak - hak dasar anak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 s/d 18 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yakni :

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
3. Hak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
4. Hak mendapat perlindungan dari perlakuan:

   a) diskriminasi;

   b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

   c) penelantaran;

   d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya;

5. Hak diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Anak juga akan mendapat cibiran dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan, aka nada stigma jelek serta olokan bagi sang anak yang pastiakan memepengaruhi mental anak dan tumbuh kembang anak.

Dengan uraian di atas, perkawinan siri hanya menguntungkan bagi suami atau laki – laki dan akan merugikan istri atau wanita dan anak – anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Istri yang disayang dahulu sepenuh hati oleh orangtuanya dan akhirnya berhak untuk bahagia bersama lelaki yang ia pilih sebagai suaminya dan imamnya, memiliki keluarga yang aman, tentram serta bahagia. Namun dengan dipilihnya nikah siri ini, kebahagiaan serta hak – hak yang istri dapat tidak penuh bahkan banyak merugikan istri dan keluarga.

Sama halnya dengan anak, tiap anak memiliki hak dalam hidup, berhak mendapatkan tumbuh kembang yang baik, serta berpartisipasi dalam keluarga maupun bermasyarakat sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak wajib pula dilindungi dari berbagai macam kejahatan serta kekerasan baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat, dantidak berhak mendapatkan deskriminasi. Ia pun berhak menentukan jalannya sendiri, satu diantaranya ialah hak - hak sipil serta hak kebebasan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berbagai akibat perkawinan siri sebagaimana di atas mengalami perubahan setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap Pasal 43 ayat UUP. Putusan MK ini berpengaruh terhadap perubahan hukum bagi istri dan anak yang lahir dalam perkawinan siri tersebut. Berikut hasil Putusan MK :

1) Terhadap Anak

Putusan MK tersebut, secara *mutatis mutandis* telahmenimbulkan banyak perubahan hukum, antara lain, yaitu:

a. Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah *(sunnatullah)* semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata.
b. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya sebagaimana hubungan perdata anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pengakuan secarahukum ini sebelumnya tidak ada.
c. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatannya, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat digugat untuk bertanggung jawab atas anak biologisnya.

Sementara berkaitan dengan wali nikah, ternyata putusan MK tersebut tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP yang menyatakan: “Anak yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Dengan demikian, maka ayah biologis tidak serta merta dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya karena untuk menjadi wali nikah disyaratkan adanya legalitas hukum.Hubungan wali nikah merupakan hubungan resmi yang memerlukan legalitas hukum. Namun demikian apabila adanya hubungan nasab telah dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan dan telah mempunyai akta kelahiran, maka ayahnya dapat bertindak sebagai wali nikah bagi anak perempuannya yang lahir di luar perkawinan. (Arto, 2012).

2) Terhadap Perempuan / Istri

Keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tidak membahas mengenai perempuan (istri) dalam perkawinan siri, namun berdasar analisa dari penulis dengan adanya putusan MK tersebut, yang semula anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setelah keputusan itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak hanya berhubungan secara keperdataan hanya terhadap ibunya, akan tetapi juga terhadap laki - laki yang terbukti sebagai ayah biologisnya.

MK berpendapat bahwa bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 harus dibaca: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Ringkasnya keputusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 menghasilkan :

1. Memberi legalitas hukum hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya, yakni bahwa hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya merupakan sebuah realitas menjadi hubungan hukum sehingga memiliki akibat hukum.
2. Memberi perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, baik terhadap ayahnya dan keluarga ayahnya maupun lingkungannya.
3. Memberi perlakuan yang adil terhadap setiap anak yang dilahirkan meskipun perkawinan orang tuanyatidak (belum) ada kepastian.
4. Menegaskan adanya hubungan perdata setiap anak dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya menurut hukum sebagaimana hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
5. Menegaskan adanya kewajiban ayah menurut hukum (*legal custady*) memelihara setiap anak yangdilahirkan dari darahnya.
6. Melindungi hak waris anak dari ayahnya karena adanya hubungan darah, hak dan tanggung jawab satu sama lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

7. Menjamin masa depan anak sebagaimana anak-anakpada umumnya.
8. Menjamin hak-hak anak untuk mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan biaya penghidupan, perindungan dan lain sebagainya dari ayahnya sebagaimana mestinya.
9. Memberi ketegasan hukum bahwa setiap laki – laki harus bertanggung jawab atas tindakannya dan akubat yang timbul karena perbuatannya itu, dalam hal ini menyebabkan lahirnya anak (Putusan MK, 2012: 2-36). Mereka dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Tentunya keputusan tersebut menggembirakan istri atau ibu dari anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, karena dengan demikian si anak menjadi punya kepastian hukum terhadap hak - haknya secara keperdataan terhadap bapak biologisnya, yang tentunya bisa memberi harapan yang lebih baik terhadap kehidupan si anak di masa yang akan datang. Dengan adanya keputusan ini pula, tentu akan berakibat bagi laki - laki untuk lebih berhati - hati dalam melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan lahirnya anak di luar perkawinan dan ini berarti pula dapat berpengaruh terhadap perempuan / istri dari perbuatan semena - mena dari kaum laki -laki.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara RepublikIndonesia, khususnya beberapa aturan materiil yang selama ini dijadikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sebagai rujukan dalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama (Satria,tt: 1).

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, menurut kacamata hukum nasional, anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan siri status hukumnya sama dengan anak luarkawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya (lihat Pasal43 ayat (1) UUP). Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari perkawinan siri dan juga zina, secara hukum negaratidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam akta kelahiran, anak yang lahir dari perkawinan siri tercantum bahwa telah dilahirkan seorang anak bernama siapa, haridan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Pada tanggal 17 Februari 2012Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan mengenai status hukum anak luar kawin, terkait uji materiil Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UUP. Menurut Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 43 ayat (1) dalam UU tersebut yang berbunyi "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni *inkonstitusional* sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki selama dapat dibuktikan bahwa keduanya ada hubungan biologis. "Sehingga, ayat tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

harus dibaca, ‘Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya” (Zalyunia, 2012: 7).

Apabila dianalisis, maka logika hukumnya putusan ini menimbulkan konsekuensi adanya hubungan nasab anak luar nikah dengan bapak biologisnya; adanya hak dan kewajiban antara anak luar nikah dengan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya. Hal ini tentunya berlaku apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti: tes DNA dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa benar anak diluar nikah tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai ayah biologisnya tersebut. Dalam hal ini terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, perwalian, waris dan lain sebagainya. Dampak negatifnya putusan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinilai melanggar ajaran Islam dan tatanan Hukum Islam.

Perbedaan perlindungan hukum antara anak dari hasil hubungan zina dengan anak dalam ikatan perkawinan, telah diterangkan dalam beberapa hadits shahih yang menentukan bahwa anak hasil hubungan zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. Nabi Muhammad sallahu ‘alaihi wasalam bersabda: *“Anak adalah bagi yang*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mempunyai hamparan (suami), dan bagi pezina batu (tidak berhak mendapat anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah melainkan diserahkan kepada ibunya). (HR. Bukhari-Muslim, Malik dan Abu Daud). Dalam kasus *li'an* dimana suami menuduh istri berzina, anak tidak ikut bapaknya dari segi nasab, tetapi ibunya. Sebagaimana hadits Abu Daud: "dan Rasul menetapkan agar anaknya tidak dinasabkan kepada seorang ayah pun". Dalam hadits Imam Ahmad, ditetapkan agar anakikut si ibunya.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini telah melampaui permohonan yang sekedar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan tapi tidak dicatatkan di KUA menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI menilai putusan MK ini sangat berlebihan, melampuai batas, dan bersifat "*over dosis*" serta bertentangan dengan ajaran Islam dan Pasal 29 UUD 45 (MUI, 2012). Menurut Makruf, putusan MK itu memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya karenahal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Akibat nyata putusan MK, kini kedudukan anak hasil zina dijadikan sama dengan kedudukan anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah, baik dari segi kewajiban memperoleh nafkah dan terutama hak waris. Dengan demikian, sudah jelas putusan MK ini telah menyebabkan lembaga perkawinan menjadi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kurang relevan apalagi sekedar pencatatannya, mengingat penyamaan hak antara anak hasil zina dengan anak hasil perkawinan yang sah. Hal ini sangat menurunkan derajat kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan, bahkan pada tingkat ekstrim dapat muncul pendapat tidak dibutuhkan lagi lembaga perkawinan karena orang tidak perlu harus menikah secara sah apabila dikaitkan dengan perlindungan hukum anak.

Dampak negatif lainnya hadir dalam segi teknis dengan adanya putusan MK ini, maka keadaan itu semua berubah. Diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya. Hal ini berakibat pula adanya hubungan waris. Jadi, si anak berhak atas warisan ayahnya tersebut. Ini tentu saja merepotkan pembagian warisan yang dilakukan oleh notaris. Kondisi tersebut menimbulkan masalah apabila warisan sudah terlanjur dibagikan kepada anak yang sah dari perkawinan.Lalu tiba-tiba muncul anak luar kawin yang mengklaim dan membawa bukti bahwa dia juga anak biologis dari pewaris. Selain itu berdampak kepada jual beli harta warisan, misalnya berupa tanah. Kekhawatiran lain misalnya suatu waktu dalam pembuatan Akta Jual Beli, tetapi tiba-tiba datang anak luar kawin yang menuntut karena merasa mempunyai hak waris.

Dampak positif putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 terbuka kesempatan bagi para anak diluar nikah untuk mendapatkan hak nafkah, wali, waris dan lain sebagainya. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

permohonan pemberian status anak luar kawin dari pernikahan siri bukan anak dari hasil zina. Karena tentunya hal ini membawa dampak yang bukan hanya teknis tetapi ideologis dalam akidah umat Islam.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tentang hasil penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis teliti dalam penelitian dalam hal perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat kecamatan Marpoyan Damai yang melakukan nikah siri dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni :
    a) Usia yang dibawah batas legal melakukan perkawinan
    b) Hamil di luar nikah
    c) Istri kedua
    d) Masalah Keluarga
    e) Tidak adanya akta cerai dikarenakan suami terdahulu pergi meninggalkan sang istri membuat wanita tidak bisa mengurus akta cerai.

Meski banyaknya faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan perkawinan siri di Kecamatan Marpoyan Damai dan perkawinan ini sah bila syarat dan rukunnya terpenuhi, namun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak membenarkan adanya perkawinan siri, dimana perkawinan siri merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil. Dengan begitu masyarakat telah melanggar aturan dalam Kompilasi Hukum Islam. Islam pun tidak mengajarkan umat

muslim untuk "membangkang" kepada aturan pemerintah selagi aturan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat menimbulkan beberapa konskeuensi khusunya terhadap istri dan anak

Dikarenakan perkawinan siri seagaimana yang di atur dalam Pasal 6 (2) Kompilasi Hukum Islam merupakan perkawinan yang tidak sah dan tidak diakui Negara, maka perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum. Sehingga hak – hak yang seharusnya terpenuhi dalam suatu keluarga berkurang dan bahkan hilang, khususnya untuk istri dan anak. Istri tidak berhak atas nafkah, warisan serta harta gono – gini bila berpisah dengan suami.

Untuk anak yang dilahirkan dalam perkawinan siri ini, akan mendapatkan dampak yang lebih buruk lagi. Karena tidak adanya hak – hak keperdataan dari sang ayah dan keluarga ayah, seperti nahfkah, biaya pendidikan, warisan, dan surat – surat yang diperlukan hanya tertulis nama sang ibu, yang mana Negara hanya mengakui bahwa anak tersebut hanyalah anak ibu. Sehingga hanya akan mendapatkan hak keperdataan dari ibu dan keluarga ibu. Selain itu istri dan anak akan mendapat sanksi sosial dari masuarakat dan mempengaruhi mental dan psikologis mereka sehingga kesulitan bergaul, khususnya untuk sang anak.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Setelah diketahui lebih mendalam mengenai perkawinan siri di Marpoyan Damai berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, maka ada beberapa saran yang akan penulis coba utarakan:

1. Untuk masyarakat yang hendak melakukan perkawinan siri, hendaknya lebih *aware* terhadap hukum perkawinan siri yang telah di atur oleh Negara. Hendaknya mendaftarlkan perkawinan ke KUA agar keluarga yang hendak di bangun dapat menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, menjadi keluarga yang bahagia dan tentram. Masyarakat harus memenuhi rukun dan syarat sah dari suatu perkawinan agar dapat melakukan pencatatan terhadap perkawinannya sebagaimana yang telah di atur oleh agama dan Negara yang dapat dilihat pada Kompilasi Hukum Islam maupun Undang – Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Sebaikanya pemerintah daerah, khuusnya yang lebih berwenang akan perkawinan siri, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai melakukan sosialisasi, baik secara langsung maupun di media sosial. Agar masyarakat lebih paham dan mengerti pentingnya melakukan pencatatan perkawinan dan meninggalkan perkawinan siri. Terutama untuk anak – anak maupun remaja yang berpotensi melakukan perkawinan siri. Karena penulis lihat informasi – informasi yang terdapat di pekanbaru, terlebih pada suatu ruang lingkup kecamatan itu sangat terbatas. Hanya kelompok – kelompok yang memilki relasi dengan pegawai sipil yang mendapat informasi dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

cepat. Sehingga masyarakat biasa kesulitan memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya mengenai perkawinan siri. Dengan demikian, tidak ada lagi yang memilih perkawinan siri sebgai jalan terbaik sebagai jalan keluarnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Perundang – Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

B. Buku – Buku

Azhar Basyir, Ahmad. 1980. *Hukum Perkawinan Islam,* Yogyakarta:Fakultas Hukum UII

Retnowulandari, Wahyuni. 2009. *Hukum Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia,* Jakarta: Universitas Trisakti

Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Susanto, Happy. 2007. *Nikah Siri Apa Untungnya?,* Jakarta:Visimedia

Prawirohamidjojo, Soetojo R dan Asis Safioedin. 1972. *Hukum Orang Dan Keluarga,* Surabaya:Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Rofiq, Ahmad. 2009. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Depok:Rajawali Pers

Peranginangin, Effendi. 2013. *Hukum Waris,* Jakarta:Universitas Indonesia Library

Suteki dan Taufani, Galang. 2018. *Metedologi Penelitian Hukum(Filsafat, Teori dan Praktik),* Depok:PT RajaGrafindo Persada

Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam,*Tangerang:PT. Pustaka Mandiri

Anshary MK, H.M. 2010. *Hukum Perkawinan di Indonesia:Masalah-Masalah Krusial,* Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Manshur, bin Majdi. 2019. *Mahkota Pengantin,* Jakarta:Pustaka At-Tazkia

Syuaisyi', Ali. 2005. *Kado Pernikahan,* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar

Zainuddin, Afwan Zainuddin. 2017. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahnnya ditinjau dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974,* Yogyakarta: Deepublish sampai halaman 85

Al-Asyari, Abu Mansur. 2019. Hukum Nikah Siri:Ringkasan Panduan Nikah Resmi di KUA, 2019: Deepublish

Haryati, Titik. 2018. *Nikah Siri Akankah Terus Berseri,* Depok: PT. Tosca Jaya Indonesia

C. Jurnal

Adillah, Siti Ummu. 2014. "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak", dalam Palastren volume 7 No 1 (hlm 207-209). Kudus: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Gunawan, Edi. 2013. "Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurt UU Perkawinan", dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah volume 11 Nomor 1 (hlm 22). Manado: Rumah Jurnal IAIN Manado

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Isnaini, Enik. 2014. “Perkawinan Siri dalam Prespektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Independent volume 2 No1 (hlm. 51-53). Lamongan: Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan

D. Internet

https://kumparan.com/berita-hari-ini/nikah-siri-pengertian-dampak-dan-hukumnya-di-indonesia-1vL7cqr722E

hukumonline.com

https://insulteng.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-902740107/hukum-pernikahan-siri

konsultasisyariah.com/11347-nikah-siri-tanpa-sepengetahuan-orang-tua.html#

https://muslim.or.id/32619-apa-itu-nikah-sirri.html

https://rumaysho.com/872-sahkah-nikah-sirri.html

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :